

NOTULEN LEADER'S TALK

Hari/Tanggal	:	Selasa, 8 November 2022
Pukul	:	09.00-12.00 WIB
Tempat	:	Online (Zoom)
Peserta	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus PPLBI - Anggota PPLBI - Direktorat Fasilitas Kepabeanan (Direktur Fasilitas Kepabeanan (Bp. Untung Basuki) dan tim) - Kantor Wilayah Jakarta (Kepala Kanwil Jakarta (Bp. Rusman Hadi) dan tim) - KPPBC Marunda (Kepala KPPBC Marunda (Bp. Muhtadi) dan tim) - Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (Bu Untari dan tim).
Perihal	:	Acara Leaders Talk (Kiat Sukses Menjadi PLB Teladan)
Halaman	:	6 Halaman

Berikut ini adalah hal-hal yang dibahas dalam sambutan ataupun penyampaian materi dalam leaders talk :

No.	Pembicara	Pembahasan	Hasil
1	Bp. Untung Basuki (Direktorat Fasilitas Kepabeanan)	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan hasil neraca perdagangan september 2021 – september 2022 menunjukkan surplus dimana ekspor lebih besar dibanding impor, peran logistik penting. - Optimisme pelaku usaha tetap dibangun, peluang yang ada untuk tetap dimanfaatkan - PLB kepatuhan dari pelaku usaha harus menjaga kepatuhan baik administrasi ataupun inventory. - Pelaku usaha menerapkan pengamanan barang dengan menerapkan e-seal dari pelabuhan bongkar ke PLB ataupun sebaliknya. - Pelaku usaha diharapkan bisa memanfaatkan <i>National Logistics Ecosystem</i> (NLE). - Membantu pemberdayaan UMKM untuk bertumbuh 	
2	Ibu Utami Prasetiawati (Ketua PPLBI)	<ul style="list-style-type: none"> - PLB/PDPLB diharapkan akan semakin maju dan bisa membawa amanah. - Leaders talk akan menjadi acara rutin PPLBI sebagai wadah diskusi antara anggota PPLBI dengan policy maker atau sebaliknya. - PPLBI mendapat dukungan dari DJBC RI, pipeline PPLBI kedepan tentang BUT, penyederhanaan bentuk PLB, NLE sudah mulai berjalan 	

3	Bp. Rusman Hadi (Kepala Kanwil Jakarta)	<ul style="list-style-type: none"> - Harapannya leaders talk bisa menjadi ajang akselerasi untuk penyelesaian di lapangan. - Bea Cukai akan selalu berusaha bagaimana memajukan usaha tanpa mengenyampingkan peraturan-peraturan yang ada. - Harapannya bisa menyampaikan kejadian di lapangan dan bisa diselesaikan oleh Bea Cukai. - Harapannya PPLBI dan Bea Cukai bisa bertemu secara offline agar lebih efisien. - Harmoni kerjasama antara Bea Cukai sebagai pelayanan dan pengguna jasa terjalin dengan baik. 	
4	Ibu Esti (Kasubdit TPB Direktorat Fasilitas)	<ul style="list-style-type: none"> - Mohon dukungan, pimpinan, rekan kerja dan stakeholder yang dilayani - Fasilitas tujuan untuk menumbuhkan perekonomian dan akan berkomitmen dalam hal itu. 	
5	Bp. Muhtadi (Kepala KPPBC Marunda)	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadi PLB teladan harus kita pupuk dan kembangkan untuk menjadi pilar rantai logistik nasional - Jumlah total 38 PLB yang beroperasi di Marunda terjadi 13 kali pembekuan PLB - Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi masih ada PLB yang menimbun barang melebihi batas masa timbun , serta masih ada PLB yang cctv tidak bisa diakses - Atensi pemenuhan kewajiban : ketepatan waktu pengajuan dokumen kepabeanaan, masih banyak ditemukan dokumen outstanding (belum SPPD),masa timbun paling lama 3 tahun(kecuali pengajuan perpanjangan), perubahan dokumen pabean idealnya diajukan ke petugas BC hanggar kemudian permohonan ke kantor BC - Ada beberapa permasalahan yang sering terjadi : Reject efaktur BC 3.3, permasalahan pada aplikasi, PLB e-commerce (jumlah dokumen BC 2.8 jalur hijau yang harus diputus kepala seksi sangat banyak) 	
6	Ibu Untari (Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai)	<ul style="list-style-type: none"> - IKC sudah mengembangkan aplikasi eséal akan ditampilkan dalam bentuk visualisasi - Eseal untuk monitoring dari barang - Gambaran flow dari masing-masing penyedia eséal akan mengirim data ke sistem ceisa dan akan divisualiasikan dalam web aplikasi atau mobile - Untuk fitur eséal ada (dashboard, alertm browse tracking, detail tracking) 	

Berikut ini adalah hal-hal yang dibahas dalam sesi tanya jawab di acara leaders talk :

No.	Penanya	Pertanyaan, Saran, Masukan	Jawaban
1	Pak Yudi	<p>-USDFS Kerjasama ekonomi bilateral Indonesia dan Jepang,karena masalah KPPBC Marunda tidak disebutkan sebagai formalitas kepabeannya esensi terhadap kerjasama bilateral ini kurang mengena. Mungkin hal ini perlu dibicarakan ke Direktorat Fasilitas.</p> <p>-PLB lebih dominan ke importasi, harapannya lebih ada platform yang bisa membuat konsumen luar negeri tahu produk UMKM</p>	<p>Bp. Wahyu (Direktorat Fasilitas)</p> <p>- USDFS mengikat langsung ke user (perusahaan) dan mungkin saat konfirmasi penyelesaian dokumen di pengawasan kantor tertentu, sehingga saat penyelesaian bergeser ke kantor pengawasan lain secara peraturan tidak bisa. Untuk saat ini sudah didiskusikan dengan rekan-rekan teknis direktorat fasilitas dan IKC untuk disupport secara sistem. Untuk kedepan ditambahkan kantor penyelesaian dokumennya.</p> <p>-Undangan dari Bapenas mendapat hibah k-smart logistiks dan akan di kloning ke semua plb, dengan adanya integrasi sistem logistik dari korea ini bisa kerjasama dan bisa menjadi peluang.</p> <p>Pak Muhtadi (Kepala KPPBC Marunda)</p> <p>- Segala keputusan harus diantisipasi dan dilihat dari sisi subjek, object dan semuanya, mungkin masalah ini menjadi ranah direktorat fasilitas yang bisa membantu mengkaji dan diksusi dengan rekan-rekan teknis.</p>
2	Bp.Nupus dari PT Adiperkasa Ekabakti Industry	Misalkan ada barang yang sudah melewati 3 tahun tersimpan di PLB, apakah bisa dipindahkan ke TPP dan prosedurnya seperti apa?	<p>.Pak Wahyu (Direktorat Fasilitas)</p> <p>- Barang logistik seharusnya 3 tahun waktu yang sangat cukup, secara aturan dapat diperpanjang dan diajukan ke kepala kantor, nanti akan ada assesment terkait pengajuan.Selama PLB masih ada tidak perlu ke TPP.</p>

			<p>Pak Muhtadi (Kepala KPPBC Marunda)</p> <ul style="list-style-type: none"> - sering ada perpanjangan dari Kepala KPPBC, tapi kalau sudah mentok perpanjangan terus akan diapakan lagi <p>Pak Wahyu (Direktorat Fasilitas)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tetap harus dikaji dahulu, mungkin bisa diselesaikan reexport, atau diselesaikan pajak dan lainnya
3	Bp. Eko PT Indra Jaya Swastika	Saat sending dokumen 2.8 tapi terkena NPP bahwa nama pt tsb tidak ada dalam skep padahal sudah tercantum dalam skep.	<p>Pak Wahyu (Direktorat Fasilitas) Akan dicek dulu, langsung bisa direcordkan ke fasilitas, ada link WA subdit TPB (24 jam)</p>
4	Bp. Himawan PT Sucofindo	Barang yang sudah ditimbun 3 tahun namun dari customer nya bangkrut tidak memungkinkan diambil, direexport barang juga sudah kurang bagus	<p>Pak Muhtadi (Kepala KPPBC Marunda)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solusinya reexport atau dipindahkan ke PLB lain, namun belum ada opsi barang tidak dikuasai, permasalahan ini sangat mungkin. Mungkin bisa jadi masukan BC fasilitas case ini. <p>Pak Wahyu (Direktorat Fasilitas) akan ditampung di Dirfas dan perlu hati-hati karena berkaitan dengan hukum.</p>
5	Bp. Rivai	Barang yang lewat 3 tahun ditimbun di PLB setelah diperpanjang, apakah bisa diperpanjang terus atau ada waktunya 1 atau 3x perpanjangan	<p>Pak Muhtadi (Kepala KPPBC Marunda)</p> <ul style="list-style-type: none"> - semakin banyak yang ditimbun dan tidak keluar-keluar takutnya PLB malam tidak bergerak, menjadikan macet kegiatan lainnya. - PLB sebagai katalis untuk mempermudah proses barang untuk percepatan ekonomi, bukan sebagai tujuan akhir.
6	Bp. Ruzky PT Puninar	Apakah jika belum terjadi pembayaran tapi merupakan barang jual beli sudah bisa dikategorikan jenis barang NTR saat BC 1.6?	<p>Pak Ronald (Direktorat Fasilitas) Akan didiskusikan ke teknis dahulu</p>

7	Bu Yeni Pratiwi PT Sumitronics Indonesia	Terkait transaksi KB-PLB (PER-19/BC/2018 pasal 34) terjadi kendala hubungan bisnis antara keduanya yang mengharuskan adanya kepemilikan 1 NPWP. Harapannya, kebijakan atas aturan yang melandasi tsb, agar dapat dan bisa diterapkan sesuai dengan kepentingan bisnis tematik dari PLB	Pak Wahyu (Direktorat Fasilitas) Secara integrasi tetap support dan bantu identifikasi Pak Ronald (Direktorat Fasilitas) Skema integrasi dalam bentuk ND
8	Bp. Ridhwan Fakhri PT Hankyu Hanshin Logistics Indonesia	Stok konsinyasi (stock consignee), penentuan BUT atau non BUT seperti apa, selama pemilik barang berada di luar negeri?	Pak Ronald (Direktorat Fasilitas) BUT ini sebenarnya konsinyasi, tidak ada pungutan negara. Pada saat impor dan keluar lagi tidak masalah, yang jadi masalah jika ada barang lokal masuk ke dalam PLB untuk dibawa ke luar negeri. Jika impor masuk PLB dan dijual dilokal bisa namun harus ada importir di Indonesia
9	Bu Cicilia Santoso PT Panca Kusuma	Stok konsinyasi pemilik barang diluar negeri A, terjadi perubahan kepemilikan barang dari A ke B yang adalah perusahaan luar negeri juga, apakah diperbolehkan dan bagaimana mekanisme secara kepabeanan dan proses di PLB?	(Belum terjawab di take note dulu dan dibahas dulu oleh Direktorat Fasilitas)
10	Bp.Fudin PT Transcon Indonesia	Proses SPPD dokumen dalam P3BET dilakukan oleh Bea Cukai pemuatan/BC pengawas? karena ada masalah saat proses ekspor barang sudah keluar dari PLB dan sudah diterima di gudang pelabuhan muat namun untuk dokumen masih belum SPPD status masih GATE IN PELABUHAN MUAT. Barang yang diekspor LCL, kebetulan doku,en P3BET kami kantor pengawas Marunda dan kantor pemuatan tanjung priok.	Pak Muhtadi (Kepala KPPBC Marunda) akan jadi masukan, saat di kantor dicek kembali dan didiskusikan
11	Bu Tya PT Transcon Indonesia	Bagaimana ketentuan penggunaan e-seal jika digunakan untuk cargo / breakbulk?	Pak Ronald (Direktorat Fasilitas) Mungkin bisa dikoordinasikan dengan kantor pelayanan, kalau dipaksakan takutnya tidak efektif. Pak Vicky (PT Vopak Terminal) Bisa membuat surat arahan jika es seal hanya digunakan untuk container saja, dari pusat ada arahan nota dinas/perdirjen untuk arahan semua kantor pelayanan Pak Andika (Direktorat IKC) E-seal kecuali barang breakbulk bisa digunakan disemua Pak Muhtadi (Kepala KPPBC Marunda) Eseal bisa memantau terkait pergerakan barang, harus ditempatkan ditempat aman

12	Ibu Yeni PT Sumitronics Indonesia	ND 304 skema integrasi KB-PLB sudah dikonsultasikan ke KPPBC juga membawa ND ini, namun atas arahan kepala kantor, ND tsb bukan mengacu pasal 34	(Belum terjawab di <i>take note</i> dulu)
13	Bp. Amirudin PT Dsv Solutions Indonesia	Terkait skema consignment jika buyernya perusahaan KB apakah tetap wajib harus ada faktur pajak pada saat submission BC 2.7 karena ada penyerahan sedangkan penjual tidak punya NPWP karena perusahaan luar negeri	(Belum terjawab di <i>take note</i> dulu)
14	Ibu Elma PT Sankyu	Jika skema barang ekspor pembeli barang dari negara A, membeli barang dari beberapa perusahaan di Indonesia, digabungkan ke dalam PLB untuk kemudian dijual/dikirimkan ke negara lain, bagaimana proses nya terutama dari segi dokumentasi dan perpajakan?	(Belum terjawab di <i>take note</i> dulu)
15	Ibu Rini Sumisho Global Logistics Indonesia	Apakah memungkinkan dilakukan konsolidasi barang impor pada PLB. Misalnya import FCL dari satu negara dikirim ke Indonesia namun barang milik A, B, C. Bagaimana treatment nya pada BC 1.6?	(Belum terjawab di <i>take note</i> dulu)
16	Anonym (Hasil Kuesioner)	Penambahan Izin SKEP untuk barang-barang diluar SKEP PLB, seperti SKEP saat ini untuk barang industri migas, tetapi ada customer dengan barang telecommunication dan garment yang ingin memakai PLB kami, namun tidak dapat dilakukan karena sulitnya/ditolaknya penambahan izin tersebut dari Kanwil	(Belum terjawab di <i>take note</i> dulu)
17	Anonym (Hasil Kuesioner)	Pro Bis Perusahaan (Jual- Beli) antara TPB KB dan TPB PLB - yang memberlakukan 1 Nomer NPWP	(Belum terjawab di <i>take note</i> dulu)

Demikian hasil meeting ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Dibuat oleh,

Sekretaris PPLBI